



PROVINSI SUMATERA BARAT

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PEJABAT FUNGSIONAL
TAHUN 2025**

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025**

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NAMNAMA JABATAN : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA
TUGAS : Melaksanakan Urusan Pelayanan Perizinan

- FUNGSI :
1. Menyusun Rencana kerja Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis Elektronik
 2. Menyiapkan, mengumpulkan, bahan perumusan, Informasi, kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan pembinaan penyalenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
 3. Mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, Sosialisasi, Menilai hasil pelaksanaan evaluasi dan laporan pengelolaan perizinan dan Non Perizinan
 4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dan Tugas lain yang diberikan Pimpinan

KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL SUBSTANSI PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Izin Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Porsentase Izin yang diterbitkan Tepat Waktu	Permohonan Izin dari Pelaku usaha dan Pertimbangan teknis dari OPD Teknis	JF. Analis Kebijakan Ahli Madya, penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

FJ. Pelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

FIRDAUS, SH. M. Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19660626 198811 1 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NAMA SKPD

: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TUGAS POKOK

: Penyajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di sub substansi Pengembangan Promosi Penanaman Modal,

Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal dan Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal

FUNGSI :

1. Penyajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
2. Penyajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
3. Penyajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
4. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan diluar negeri; dan
5. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PEHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelaksanaan Promosi Investasi	Jumlah Promosi Yang Dilikuti	Jumlah Kegiatan Promosi Investasi yang dilikuti atau Dilaksanakan	Dokumen Kegiatan Promosi Investasi yang Dilikuti atau Dilaksanakan	Rumpum Penanaman Modal Substansi Promosi Penanaman Modal
2	Meningkatnya Fasilitas Calon Investor	Jumlah Fasilitas Calon Investor ke Lokasi Proyek Investasi	Melakukan Pendampingan / Fasilitas Calon Investor ke Lokasi Proyek Investasi	Dokumen Fasilitas Calon Investor ke Lokasi Proyek Investasi	Rumpum Penanaman Modal Substansi Promosi Penanaman Modal
3	Meningkatnya Materi Promosi Investasi	Jumlah Materi Promosi Sesuai Proyek Investasi Prioritas Daerah	Melakukan Penyusunan Materi Promosi sesuai dengan Proyek Investasi Prioritas Daerah	Dokumen Materi Promosi yang sesuai dengan Proyek Investasi Prioritas Daerah	Rumpum Penanaman Modal Substansi Promosi Penanaman Modal

Analisis Kebijakan Ahli Muda
DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat

Yuniarti, S.Pd. M.Si.

Pembina

NIP. 196906011998032002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT
TUGAS : Menyiap, Mengkaji, Merumuskan Kebijakan, dan Menyusun Rencana Pembangunan pada Instansi Pemerintah secara teratur dan Sistematis termasuk Mengendalikan, Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
FUNGSI : 1. Pelaksanaan Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Program
2. Pelaksanaan dan Penyusunan Bahan Pengkoordinasian Pelaksanaan Pengelolaan Program dan keuangan dilingkungan Dinas

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Organisasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	Surat Penyampaian Dokumen Perencanaan Renstra dan Renja)	Tanda Terima Surat Penyampaian Dokumen Perencanaan (Renstra dan Renja)	Fungsional Perencana Ahli Muda
		Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dengan Dokumen Perencanaan Daerah	Hasil Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan	Hasil Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan	Fungsional Perencana Ahli Muda
		Meningkatnya Implementasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah dengan Dokumen Penganggaran	Hasil Evaluasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan	Hasil Evaluasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan	Fungsional Perencana Ahli Muda
2.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Organisasi	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Organisasi Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Pelaporan Organisasi yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen Pelaporan Organisasi Yang Disusun	Dokumen Pelaporan Organisasi Yang Disusun	Fungsional Perencana Ahli Muda
		Meningkatnya Kesesuaian Laporan dengan Pedoman Penyusunan Laporan	Persentase Kesesuaian Laporan dengan Pedoman Penyusunan Laporan	Hasil Evaluasi Kesesuaian Laporan dengan Pedoman Penyusunan Laporan	Hasil Evaluasi Kesesuaian Laporan dengan Pedoman Penyusunan Laporan	Fungsional Perencana Ahli Muda
		Meningkatnya Pemanfaatan Laporan Terhadap Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Evaluasi yang Ditindak Lanjuti Dalam Dokumen Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Fungsional Perencana Ahli Muda
3.	Meningkatnya Pengawasan Internal Organisasi	Meningkatnya Penatausahaan Perangkat Daerah	Persentase Pengurangan Kesalahan Hasil Verifikasi Keuangan	Hasil Evaluasi atas Penatausahaan Keuangan	Hasil Evaluasi atas Penatausahaan Keuangan	Fungsional Perencana Ahli Muda
		Meningkatnya ASN Yang Mengisi LHKPN/LHKASN Tepat Waktu	Jumlah ASN Yang Mengisi LHKPN/LHKASN Tepat Waktu	Laporan Penyampaian Pengisian LHKPN	Jumlah Bukti Penyampaian Pengisian LHKPN oleh ASN Wajib Lapor LHKPN Tepat Waktu	Fungsional Perencana Ahli Muda

Fungsional Perencana Ahli Muda
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat



SYAFWIRDI, SE, M.Si
Pembina

NIP. 19680706 198703 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NAMA SKPD

: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TUGAS POKOK

: Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di sub substansi Pengaduan dan Informasi Layanan, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan dan Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

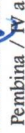
FUNGSI :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di sub substansi Pengaduan dan Informasi Layanan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di sub substansi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di sub substansi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
4. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
5. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
6. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
8. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PEHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Terfasilitasinya Pengaduan Layanan Perizinan	Jumlah Pengaduan Layanan Perizinan Yang Difasilitasi / Mediasi	Jumlah Pengaduan Yang Difasilitasi / Mediasi	Dokumen Data Pengaduan Layanan Perizinan Yang Difasilitasi / Mediasi	Rumpum Perizinan Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
2.	Terlaksananya Sosialisasi Pengaduan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	Jumlah Sosialisasi Pengaduan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	Jumlah Sosialisasi Pengaduan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	Dokumen Sosialisasi Sosialisasi Pengaduan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	Rumpum Perizinan Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
3.	Terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Realisasi Target Survey IKM x 100% Jumlah target Survey IKM	Data Indeks Kepuasan Masyarakat	Rumpum Perizinan Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Padang, Januari 2025

Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat


Roy Defrinaldi Eka Putra, ST, MM
Pembina /  a

NIP. 197610042002121005

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NAMA JABATAN : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
TUGAS : Melaksanakan urusan perencanaan penanaman modal
FUNGSI : 1. Pengajian dan pengusulan teknis tata kelola di bidang penanaman modal
2. Pengembangan peluang, potensi, dan strategi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha
3. Penetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
4. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal;
5. Pengembangan sistem di bidang penanaman modal

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya realisasi investasi di Sumatera Barat	1. Tersedianya dokumen kajian potensi dan peluang investasi 2. Terlaksananya pembaharuan data potensi dan peluang investasi 3. Tersusunnya laporan penyelenggaraan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal 4. Terlaksananya Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi 5. Tersusunnya laporan penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	1. Jumlah dokumen kajian potensi dan peluang investasi 2. Jumlah pembaharuan data potensi dan peluang investasi 3. Jumlah laporan penyelenggaraan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal 4. Jumlah Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi yang dilaksanakan 5. Jumlah laporan penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	Melakukan identifikasi, menganalisis, merumuskan, dan menyusun data dan dokumen perencanaan penanaman modal, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal dalam rangka pengembangan iklim dan peningkatan realisasi investasi di Sumatera Barat	6	7 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

Penata Kelola Modal Penanaman Modal Ahli Muda
 DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

HARJO SE. MM. AK
 NIP. 405411092000031003

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT

TUGAS : Membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

FUNGSI : 1. Membantu Melaksanakan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Penanaman modal

2. Melaksanakan Identifikasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman modal lingkup daerah

3. Melaksanakan Bimtek/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis risiko dan Bimtek/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha berbasis risiko

4. Melaksanakan Pengawasan Penanaman modal kepada Perusahaan PMA dan PMDN di Sumatera Barat

5. Mengidentifikasi Perusahaan yang akan diawasi melalui Akun Data OSS dan Membuat Daftar Long List dan Short List Perusahaan yang akan diawasi

6. Melaksanakan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

7. Mengumpul Laporan Triwulan dari Kabupaten/Kota

8. Verifikasi Laporan data Triwulan dari Kabupaten Kota

9. Berkoordinasi dengan kabupaten/kota Terkait dengan Penyelesaian Penanaman Modal

10. Menyelesaikan Administrasi Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN yang dilakukan Pengawasan	$\frac{\text{Realisasi Target Pengawasan}}{\text{Jumlah target Pengawasan}} \times 100\%$	Perusahaan PMA/PMDN yang telah memiliki Perizinan Berusaha (OSS- RBA)	Analisis Kebijakan Ahli Muda
2	Meningkatnya Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang handal	$\frac{\text{Realisasi Target Data dan Sistem Informasi}}{\text{Jumlah target Data dan Sistem Informasi}} \times 100\%$	Data dan Informasi Penanaman Modal dari Kabupaten/kota, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dan data Perizinan berusaha di OSS-RBA	Analisis Kebijakan Ahli Muda
3	Meningkatnya penyelesaian Permasalahan Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal yang difasilitasi	$\frac{\text{Realisasi Target Penyelesaian Permasalahan}}{\text{Jumlah target Penyelesaian Permasalahan}} \times 100\%$	Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Laporan dari Masyarakat dan pelaku Usaha, LAPOR SPAN, Media Sosial, Media Elektronik dan media Cetak	Analisis Kebijakan Ahli Muda
4	Meningkatnya penyelesaian Permasalahan Investasi PMA dan PMDN	Jumlah peserta Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan berusaha berbasis risiko dan Bimbingan teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha berbasis risiko	$\frac{\text{Realisasi Target Bimtek/Sosialisasi}}{\text{Jumlah target Bimtek/Sosialisasi}} \times 100\%$	Data pelaku usaha yang sudah memiliki OSS dan Belum memiliki Perizinan (OSS-RBA) dan lainnya	Analisis Kebijakan Ahli Muda

Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat


Adi Usman, S.P.
Penata TK. I

NIP.197709012006041009

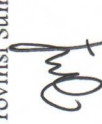
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT
TUGAS : Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dan Pengelolaan Data dan informasi Penanaman Modal

FUNGSI :
1. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Sub substansi Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman modal;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sub Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman modal;

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Realisasi FMDN dan PMA	Meningkatnya Kualitas data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	(Jumlah data yang sudah di kelola berbasis teknologi informasi/ seluruh data penanaman modal) x 100%	OSS-RBA, Realisasi Investasi , LKPM	Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
2	Meningkatkan Realisasi FMDN dan PMA	Meningkatnya Pengawasan Penanaman Modal	Persentase Kegiatan Usaha PMA dan FMDN yang dilakukan Pengawasan	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan PMA dan FMDN Yang dilakukan Pengawasan tahun } n}{\text{Jumlah Perusahaan PMA dan FMDN tahun } n} \times 100\%$	OSS-RBA, Realisasi Investasi , LKPM	Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
3	Meningkatkan Realisasi FMDN dan PMA	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Investasi PMA dan FMDN	Jumlah Perusahaan PMA dan FMDN yang di fasilitas i Permasalahan Investasinya	Dokumen Data Perusahaan PMA dan FMDN yang Difasilitasi Permasalahannya pada tahun n	OSS-RBA, Realisasi Investasi , LKPM	Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
4	Meningkatkan Realisasi FMDN dan PMA	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Investasi PMA dan FMDN	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan teknis / sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha berbasis resiko dan pengawasan Perizinan Berusaha berbasis resiko	Jumlah Pelaku Usaha yang telah di berikan Bimbingan Teknis/ Jumlah target Pelaku Usaha yang akan diberikan Bimbingan Teknis X100%	OSS-RBA, Realisasi Investasi , LKPM	Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

Padang, 01 Januari 2025
Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
DPM & FTSP Provinsi Sumatera Barat



Maineliza SE
Penata Tk.V

NIP. 197805242007012004

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT
TUGAS : Melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, penyusunan naskah bahan penerjemahan, serta pengalihaksaraan dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti
FUNGSI : 1. Menyiapkan bahan penerjemah tulisan;
2. Melakukan penelusuran referensi dan/atau dokumen pendukung bahan penerjemahan tulis;
3. Melakukan penerjemahan lisan;
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Fasilitas Calon Investor	Jumlah Fasilitas Calon Investor ke Lokasi Proyek Investasi	Merupakan kegiatan penerjemahan lisan yang dilaksanakan	Rumpun Penanaman Modal	Penerjemah Ahli Muda
2	Meningkatnya Materi Promosi Investasi	Jumlah Materi Promosi Sesuai Proyek Investasi Prioritas Daerah	Merupakan kegiatan penerjemahan lisan yang dilaksanakan	Rumpun Penanaman Modal	Penerjemah Ahli Muda

Penerjemah Ahli Muda
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat



LELYANA, S.S.

Penata Tk I

NIP. 19790201 200903 2 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT

TUGAS : Melaksanakan Penataan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan.

FUNGSI : 1. perencanaan pelaksanaan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan

2. pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan

3. penyuluhan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan kepada masyarakat

4. 5. pengawasan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Terfasilitasi Pengaduan Layanan Perizinan	Jumlah Pengaduan Layanan Perizinan Yang Difasilitasi atau di Mediasi	4	5	6
1.			Terfasilitasi Pengaduan Layanan Perizinan berarti adanya sistem atau sarana yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait layanan perizinan.	Rekap Pengaduan	Kepala Dinas DPMTSP Prov. Sumbar
2.	Terdaksananya Sosialisasi Kebijakan Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Layanan Perizinan dan Non Perizinan	4		
2.			Terdaksananya Sosialisasi Kebijakan Layanan Perizinan dan Non Perizinan berarti kebijakan terkait perizinan dan non perizinan telah disampaikan kepada masyarakat atau pihak terkait melalui kegiatan sosialisasi.	Dokumen Laporan Kegiatan	Kepala Dinas DPMTSP Prov. Sumbar
3.	Tugas tambahan sesuai arahan pimpinan untuk mendukung kinerja perangkat daerah.	Menyelesaikan tugas lain sesuai arahan pimpinan untuk mendukung kinerja perangkat daerah.	4		
3.			Tugas tambahan sesuai arahan pimpinan untuk mendukung kinerja perangkat daerah** berarti tugas ekstra yang diberikan oleh pimpinan untuk membantu meningkatkan efektivitas dan pencapaian tujuan perangkat daerah.	Dokumen Tugas Lainnya	Kepala Dinas DPMTSP Prov. Sumbar
4.	Tersedianya Sistem Penyelenggaraan Izin Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Sistem Penyelenggaraan Izin Yang Berbasis Teknologi Informasi	4		
4.			Ketersedianya Sistem Penyelenggaraan Izin Berbasis Teknologi Informasi** berarti adanya platform digital yang mempermudah proses pengajuan dan pengelolaan izin secara online.	Laporan Perizinan	Kepala Dinas DPMTSP Prov. Sumbar
5.	Tersedianya Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan	Jumlah SOP dan SP Terkait Pelayanan	4		
5.			Tersedianya Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan berarti telah disusun pedoman kerja dan standar kualitas layanan untuk memastikan proses yang efisien dan konsisten.	Dokumen SOP dan SP	Kepala Dinas DPMTSP Prov. Sumbar

Penata Perizinan Ahli Muda
DPMTSP Provinsi Sumatera Barat

Aswandi, SE, M.A.P
Penata Tk. 1

NIP 19850722009021001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TUGAS POKOK : Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Modal, Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengolahan Data dan Sistem Informasi.

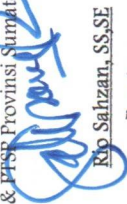
FUNGSI :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sub substansi Pemantauan dan Pengawasan
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di sub substansi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di sub substansi Pengolahan Data dan Sistem Informasi;
4. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
5. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
6. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usahadan
7. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
9. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Realisasi FMDN dan FMA	Meningkatnya Kualitas data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	(Jumlah data yang sudah di kelola berbasis teknologi informasi / seluruh data penanaman modal) x 100%	OSS-RBA, Realisasi Investasi , LKPM	Analisis Kebijakan Ahli Muda enanaman Modal
2	Meningkatkan Realisasi FMDN dan FMA	Meningkatnya Pengawasan Penanaman Modal	Persentase Kegiatan Usaha FMA dan FMDN yang dilakukan Pengawasan	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan FMA dan FMDN Yang dilakukan Pengawasan tahun } n}{\text{Jumlah Perusahaan FMA dan FMDN tahun } n} \times 100\%$	OSS-RBA, Realisasi Investasi , LKPM	Analisis Kebijakan Ahli Muda enanaman Modal
3	Meningkatkan Realisasi FMDN dan FMA	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Investasi FMA dan FMDN	Jumlah Perusahaan FMA dan FMDN yang di fasilitasi i Permasalahan Investasinya	Dokumen Data Perusahaan FMA dan FMDN yang Difasilitasi Permasalahannya pada tahun n	OSS-RBA, Realisasi Investasi , LKPM	Analisis Kebijakan Ahli Muda enanaman Modal

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
4	Meningkatkan Realisasi FMDN dan FMA	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Investasi FMA dan FMDN	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan teknis / sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha berbasis resiko dan pengawasan Perizinan Berusaha berbasis resiko	Jumlah Pelaku Usaha yang telah di berikan Bimbingan Teknis/ Jumlah target Pelaku Usaha yang akan diberikan Bimbingan Teknis X100%	OSS-RBA, Realisasi Investasi , LKPM	Analisis Kebijakan Ahli Muda enananan Modal

Padang, Januari 2025
DPM & PPS Provinsi Sumatera Barat


Ryo Sahzan, SS, SE
Penata

NIP. 197806122008031001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT
 TUGAS : Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
 FUNGSI : 1. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan
 2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di subkoordinatir pelayanan perizinan; Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Tertampilnya Pengaduan Layanan Perizinan.	1. Jumlah laporan Pengaduan Layanan Perizinan Yang Difasilitasi/Mediasi.	Jumlah laporan realisasi pengaduan layanan dibagi dengan jumlah data target per triwulan.	5	6
2.	Tertampilnya Sosialisasi Kebijakan Layanan Perizinan dan Nonperizinan.	2. Jumlah laporan Sosialisasi Kebijakan Layanan Perizinan dan Nonperizinan.	Jumlah laporan realisasi sosialisasi dibagi dengan jumlah data target per triwulan		Urusan Perizinan
3.	Tersedianya Sistem Penyelenggaraan Berbasis Teknologi Informasi.	3. Jumlah Sistem Penyelenggaraan Izin Yang Berbasis Teknologi Informasi.	Jumlah laporan realisasi sistem penyelenggaraan izin dibagi dengan jumlah data target per triwulan.		
4.	Meningkatnya Inovasi Layanan Perizinan.	4. Jumlah Inovasi Layanan Perizinan dan Nonperizinan yang Implementatif.	Jumlah realisasi inovasi layanan dibagi dengan jumlah data target per triwulan		
5.	Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) Dan Standar Pelayanan (SP) Tentang Pelayanan.	5. Jumlah SOP dan SP Terkait Pelayanan.	Jumlah laporan realisasi SOP dan SP terkait pelayanan dibagi dengan jumlah data target per triwulan		
6.	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemberi Layanan.	6. Persentase SDM Pemberi Layanan Yang Diberi Pelatihan.	Laporan persentase realisasi SDM pemberi layanan yang diberi pelatihan dibagi dengan jumlah data target per triwulan.		

Penata Perizinan Ahli Pertama
 DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Goldy Hartes, S.AP

Penata Muda,

NIP. 19850802 201001 1 004